

KETERLIBATAN PERSATOEAN PERKOEMPOELAN KAOEM BOEROEH (PPKB) DALAM GERAKAN BURUH DI JAWA 1919-1921

Ahmad Yasin

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta,
ahmad.yasin2016@student.uny.ac.id.

Abstrak

Kaum buruh bergerak mencari saluran aspirasi akan kondisi kerja lewat serikat buruh pada awal abad ke-20. Akhir 1919, sebagian serikat berhimpun dalam sebuah federasi bernama Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB). Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pertumbuhan serikat buruh di Jawa awal abad ke-20, pengaruh pembentukan PPKB dalam gerakan buruh, dan dampak keretakan PPKB bagi gerakan buruh. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian menunjukkan pertumbuhan serikat buruh menandai kaum buruh menyalurkan aspirasinya secara terorganisir. Pertumbuhan gerakan buruh dilirik organisasi politik yang menghasilkan usaha menyatukan kekuatan serikat dalam PPKB. PPKB berpengaruh saat mengawal pemogokan buruh percetakan di Semarang pada awal 1920, tetapi kemudian federasi ini terkendala operasional organisasi dan tertekan oleh konflik internal. Konflik meretakkan PPKB yang berdampak bagi perpecahan federasi ini pada 1921.

Kata kunci: PPKB, Gerakan, Jawa

Abstract

The workers moved to find a channel for aspirations for working conditions through trade unions in the early 20th century. At the end of 1919, several unions formed a federation called Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB). The purposed of this study was to explain the development of organized workers through labor unions in Java, the influenced of the formation of the PPKB in the labor movement, and the impact of the internal conflict of the PPKB on the labor movement. This study used the historical method through four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study showed that trade unions are a place where workers can channel their aspirations in an organized manner. The growth of the labor movement was noticed by political organizations which resulted in efforts to unite the power of unions in the PPKB. The PPKB was influential in guarding a strike by printing workers in Semarang in the early 1920s. The federation was hampered by organizational operations and pressured by internal conflicts. The conflict that appeared the PPKB which resulted in the split of this federation in 1921.

Keywords: PPKB, Movement, Java.

PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang Agraria diterapkan, perusahaan seperti pabrik gula kian tersebar di pedalaman Jawa pada 1910-an. Kurang lebih sebanyak dua ratus pabrik gula terkonsentrasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur (Bambang Sulisty, 1995: 11). Sebagai salah satu industri yang cukup deras mengalirkan keuntungan, gula pada akhirnya juga punya efek domino berupa dibangunnya sejumlah infrastruktur pendukung.

Jalur kereta api dibuka mulai 1867 di Jawa. Perusahaan kereta api swasta, *Nederlandsch Indische Spoorweg* (NIS), dan perusahaan kereta api negara, *State Railway* (SS), membidani jalur-jalur kereta wilayah Jawa bagian tengah dan timur. Jalur-jalur tersebut merupakan lintasan bagi kereta yang akan mengangkut gula hasil perkebunan tebu di *Vorstenlanden* (Takashi Shiraishi, 1997: 9). Sementara itu, Terusan Suez yang dibuka sejak 1869 dan kemunculan kapal uap semakin mempengaruhi kelancaran hubungan dengan Eropa (M.C. Ricklefs, 2010: 271).

Perubahan sosial di Jawa, seperti diakibatkan krisis karena meningkatnya penduduk yang tidak memiliki tanah dan perluasan ekspor hasil panen dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyebabkan urbanisasi yang mempengaruhi kemunculan buruh upahan di perkotaan. Mereka meliputi pekerjaan sebagai pegawai administrasi, juru ketik, montir, tukang kayu, buruh bangunan, kompositor, operator mesin, masinis, hingga pembantu rumah tangga (John Ingleson, 2013: 114 dan 116).

Tumbuhnya buruh perkotaan di Jawa bukan berarti meningkatnya taraf hidup mereka. Kondisi kerja buruh perkotaan dikeluhkan oleh hampir semua buruh dari masing-masing jenis pekerjaan: buruh kereta api, buruh percetakan, buruh industri logam, pabrik gula, maupun pegadaian. Keluhan tersebut menyangkut lamanya jam kerja, minimnya hari libur, denda apabila melakukan keteledoran, hingga persoalan rasisme. Sekadar contoh, buruh kereta api masa itu bahkan bisa kerja 10 sampai 12 jam per hari (John Ingleson, 2013: 129 dan 42). Kondisi tersebut bisa jadi disebabkan ketiadaan suatu upah minimum dan jam kerja ideal di Jawa karena yang berhak menentukan adalah perusahaan.

Sebuah komisi yang dibentuk untuk memperkenalkan upah minimum baru memberikan laporan pada 1920. Laporan itu menemukan, buruh tidak terdidik sangat mungkin diragukan sanggup memenuhi standar minimal kelayakan hidup mengingat upahnya yang terlampau kecil. Inflasi yang berlangsung antara tahun 1913-1920 memperparah situasi. Harga barang konsumsi melonjak naik sampai dua kali lipat, meningkatkan biaya hidup yang sudah besar. Di sisi lain, gaji yang diterima para buruh tidak pernah tinggi (John Ingleson, 2013: 43).

Masalah terkait kondisi kerja di atas turut andil mempengaruhi terbentuknya kesadaran buruh akan kondisi kerjanya. Hal itu diwujudkan dengan protes-protes dan pendirian serikat buruh. Berbagai serikat buruh tumbuh di kota-kota besar di Jawa awal abad ke-20, mulai dari *Staatsporbond*, *Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP), *Personeel Fabriek Bond* (PFB), Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB), Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), Perserikatan Boeroeh Tjitak (PBT), hingga Perserikatan Pegawai Dinas Hutan (PPDH).

Hubungan yang terjalin antara sebagian pemimpin serikat dengan organisasi politik masa itu merupakan salah satu fenomena yang mewarnai geliat pergerakan buruh. Misalnya, PFB, VSTP, dan PPPB memiliki pimpinan yang juga aktif di organisasi politik seperti Sarekat Islam dan ISDV (Takashi Shiraishi, 1997: 135, 145, dan 148). Puncaknya, terjadi hubungan serikat buruh dan organisasi politik yang membidani satu federasi untuk mengoordinir serikat-serikat buruh, bernama Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB). Tahun 1919-1921 dipilih sebagai batasan temporal penelitian ini karena 1919 menjadi waktu berdirinya PPKB dan 1921 merupakan berakhirnya PPKB dalam perpecahan (Takashi Shiraishi, 1997: 300 dan 315).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan serikat buruh di Jawa awal abad ke-20 dan pengaruh pembentukan PPKB dalam gerakan buruh. Akan diketahui pula bagaimana dampak keretakan PPKB bagi gerakan buruh.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk melakukan pengujian dan analisis terhadap data-data sejarah. Langkah-langkah penelitian ini meliputi, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Tim Prodi Ilmu Sejarah, 2020: 4).

Heuristik merupakan tahap pertama untuk mengumpulkan data-data relevan yang digunakan, baik berbentuk arsip, terbitan resmi, dan buku-buku pendukung. Arsip untuk penelitian ini yaitu, Perpustakaan Nasional RI No. Roll 2014/PN/M. *Soeara Bekelai*, no. 1, thn. 1, 29 Februari 1920, dan Perpustakaan Nasional RI No. Roll 2014/PN/M. *Soeara Bekelai*, no. 2, thn. 1, 30 Maret 1920. *Kedua*, kritik sumber atau tahap untuk menguji otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang sudah ditemukan, baik secara fisik maupun isi sumber. *Ketiga*, tahap interpretasi yang dilakukan untuk menemukan fakta sejarah berdasarkan data dari kurun waktu tertentu. *Keempat*, historiografi atau tahap penulisan sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Serikat Buruh di Jawa Awal Abad ke-20

Pada awal abad ke-20, perhatian kaum buruh di Jawa mengenai cara-cara lebih formal untuk menyalurkan aspirasi buruh melalui serikat diwarnai dengan masalah keanggotaan. Ini terjadi ketika para buruh Eropa yang bekerja di Jawatan Kereta Api Negara bagian pengangkutan mendirikan *Staatspoorbond* (Sarekat Kereta Api Pemerintah) pada 1905. Proporsi keanggotaan serikat tampak memberikan buruh Eropa mendominasi posisi pimpinan bersama buruh Indo-Eropa. Buruh bumiputera hanya diberi tempat yang rendah dan aspirasi mereka minim disuarakan oleh pimpinan serikat (Robert Van Niel, 2018:179).

Buruh tingkat rendah memilih keluar dari keanggotaan *Staatspoorbond*. Serikat ini sudah tak terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Tenggelam oleh kiprah serikat lain yang serupa dan menyelesaikan isu keanggotaan sebagai salah satu langkah melanjutkan eksistensinya. Serikat yang dimaksud adalah serikat yang berdiri tiga tahun setelah *Staatspoorbond*. Dibentuk pada 14 November 1908 di

Semarang, serikat tersebut bernama *Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP).

Orang-orang di balik pendirian serikat kereta api dan trem ini adalah buruh Eropa sejumlah 63 orang. Masing-masing berasal dari tiga perusahaan kereta api swasta, antara lain *Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS), *Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij* (SCS), dan *Semarang-Juwana Stoomtram Maatschappij* (SJS). Ketiganya berbasis di Semarang (John Ingleson, 2013: 33).

Keluarnya kebijakan baru dari pimpinan serikat membuat keanggotaan VSTP sudah tidak didominasi buruh Eropa. Perubahan ini tampak kentara dibandingkan pada awal-awal berdiri. Tahun pertama pembentukannya, VSTP memiliki 200 anggota orang Eropa dan hanya 10 orang bumiputera (Ruth T. McVey, 2009: 49). Namun dalam perkembangannya buruh bumiputera segera menjadi mayoritas dalam keanggotaan VSTP pada 1915, yakni berjumlah 1.439 dari total anggota 2.292. Buruh yang berhasil direkrut pun tidak hanya dari perusahaan kereta api swasta, melainkan sudah menyasar Jawatan Kereta Api Negara. Bahkan, sebagian anggota *Staatsporbond* mengundurkan diri untuk merapat ke VSTP. Perkembangan ini merupakan salah satu kemajuan yang dialami VSTP karena pada awalnya dimulai sebagai serikat buruh swasta, meskipun kebijakan ini tidak bisa diterima seluruh anggota Eropa (John Ingleson, 2013:36).

Setelah pembentukan kedua serikat di atas, tahun-tahun selanjutnya makin semarak oleh munculnya banyak serikat buruh dari bidang dan jenis pekerjaan bermacam-macam. Pertumbuhannya hampir beriringan dengan organisasi politik dari kalangan bumiputera terpelajar. Serikat Pegawai Bea Cukai (PBP) berdiri pada 1911, setahun kemudian Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) lahir. Tahun 1916, terdapat Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) dan Serikat Penguasa Candu Hindia Belanda (Robert van Niel, 2018: 180-181; Semaoen, No. 1, 1966: 60). Serikat-serikat ini berasal dari lingkungan dinas pemerintahan.

Serikat buruh dari perusahaan-perusahaan nonpemerintah juga mulai tumbuh, antara periode 1917-1920. Terdapat *Personeel Fabriek Bond* (PFB) atau serikat pegawai pabrik gula yang berdiri tahun 1917 dan pada tahun 1918 lahir pula

Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani (PKBT). Belakangan, muncul pula nama-nama seperti *Typografenbond* (serikat buruh percetakan) dan Serikat Pegawai Pelikan Hindia yang sebagian pimpinannya anggota PKI; (Semaoen, No. 1, 1966: 60).

Kemunculan serikat buruh pada dasawarsa 1910-an terjadi bersamaan dengan kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat. Harga kebutuhan pokok menjadi sukar dijangkau lantaran merangkak naik sampai dua kali lipat pada kurun tahun 1913-1918 atau ketika Perang Dunia I (John Ingleson, 2013: 11). Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan konsumsi beras daerah Jawa yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaannya. Pemerintah memutuskan untuk impor beras. Namun, dampak buruk dari ketergantungan pada impor dirasakan saat terhambatnya jalur distribusi dan terjadi kegagalan panen di negara pengekspor. Pada 1917, Inggris melarang ekspor beras dari India dan Singapura ke Hindia Belanda (George D. Larson, 1990: 159). Pada 1919 dan 1920, gagal panen dialami oleh Burma dan Thailand sebagai negara pengekspor beras (John Ingleson, 2013: 11).

Efek dari kesulitan distribusi pangan terekam di daerah Surakarta dan sekitarnya dalam laporan pers antara 1919 sampai akhir 1920. Terbit banyak laporan mengenai kekurangan pangan, harga makanan yang mahal, masalah keamanan, bertambahnya jumlah pengemis, hingga kasus penjualan anak dari keluarga yang tidak mampu (George D. Larson, 1990: 160). Sementara itu di Pekalongan, antrian pembelian beras memanjang sampai satu kilometer (bambang Sulisty, 1995: 62).

Meningkatnya biaya hidup rupanya tidak banyak dibarengi oleh kenaikan upah dan membaiknya kondisi kerja kaum buruh. Akibatnya, tindakan perlawanan berupa pemogokan untuk merespon keadaan mengalami peningkatan dari sisi partisipasi antara 1917-1920. Dari keseluruhan pemogokan, 25% berakhir dengan kemenangan untuk buruh; 50% berakhir kompromi antara buruh dan majikan; 25% harus berujung kekalahan bagi kaum buruh (Semaoen, No. 1, 1966: 73).

B. Perhatian Organisasi Politik pada Gerakan Buruh

Keberhasilan gerakan buruh sejauh ini bebarengan dengan dinamika organisasi politik yang tengah berlangsung saat itu. Kaum buruh dan serikat buruh mulai menjadi perhatian para elite organ politik untuk mencari dukungan massa maupun merealisasikan maksud politik mereka. Salah dua organisasi politik yang tampak memiliki motif tersebut adalah Sarekat Islam (SI) dan *Indische Sociaal-Demokratische Vereniging* (ISDV).

Pidato Tjokroaminoto pada kongres CSI di Batavia tahun 1917 mulai mempersoalkan diskriminasi ras, wacana pemerintahan sendiri, dan menentang kapitalisme. Salah satunya menyampaikan keluhan terkait masalah sewa tanah pada pabrik gula (M. Masyhur Amin, 1995: 82). Gerakan buruh diputuskan menjadi salah satu bidang utama CSI pada kongres akhir September sampai awal Oktober tahun 1918 di Surabaya (Takashi Shiraishi, 1997: 141-146).

Pada 1919, SI kembali menegaskan keberpihakannya pada kaum buruh. Kongres keempat SI di tahun tersebut merumuskan panduan mengenai cara-cara pemogokan. Aksi mogok hanya boleh dilaksanakan apabila jalan damai berakhir buntu atau dipandang cukup punya peluang besar bagi kemenangan buruh. Sebelum perlu diperluas ke tempat lain, pemogokan sebaiknya dibatasi pada satu lokasi terlebih dahulu (Deliar Noer, 1980: 135). Pengarahan ini kian memberikan citra keseriusan SI sebagai organisasi yang tidak mempersempit ruang gerak perjuangannya.

Ketertarikan ISDV pada gerakan buruh berawal ketika disadari bahwa hubungan dekat dengan VSTP sebagai serikat para buruh perkotaan belum cukup mendasari langkah-langkah revolusioner. Mereka ingin menjangkau massa buruh perkebunan, kuli, dan buruh tani di pedalaman karena golongan tersebut adalah bagian besar proletariat dan dukungan dari buruh perkotaan tidak bisa selamanya diandalkan (Ruth T. McVey, 2009: 71). ISDV lalu memperhatikan kesuksesan serikat lain. Ada dua serikat yang memperlihatkan perkembangan ke arah lebih baik di luar serikat buruh perkotaan. Kedua serikat ini memiliki massa yang belum banyak dijangkau ISDV, yakni *Personeel Fabriek Bond* (PFB) dan Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB).

Kecenderungan kalangan pergerakan pada perjuangan ekonomi diperkuat oleh pandangan positif pemerintah. Di samping mengalihkan dari tujuan-tujuan politik, pemerintah menganggap tindakan memperjuangkan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan adalah hal yang wajar. Pemerintah juga menilai serikat buruh sebagai jalur penekan perbaikan nasib. Ketika ada pertentangan antara buruh dan majikan, pemerintah mengambil posisi sebagai pihak penengah dalam pertentangan itu (Ruth T. McVey, 2009: 69; Takashi Shiraishi, 1997: 147).

Dalam konteks inilah, lahir gagasan pembentukan federasi untuk mempersatukan serikat-serikat buruh. Tepatnya, mulai dibahas pada bulan Mei 1919, tatkala Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) menyelenggarakan kongres di Bandung. Sosrokardono bersama Alimin, Semaoen, dan Bergsma menyusun rencana mengenai pembentukan federasi yang dimaksud, terutama untuk lebih mengeratkan serikat buruh dari ISDV dan SI menjadi satu front.

C. Pembentukan PPKB dan Fungsinya Sebagai Federasi

Pada pertengahan 1919. Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB) menyelenggarakan kongres di Bandung, dihadiri oleh perwakilan organisasi politik antara lain ISDV dan Boedi Oetomo pada 10 sampai 13 Mei 1919 (Bambang Sulistyono, 1995: 89; *Sinar Hindia* No. 146, thn. 21, 31 Juli 1920: 1). Melalui kongres ini, terjadi pembahasan untuk membentuk federasi guna mempersatukan serikat-serikat buruh.

Pembicaraan mengenai badan sentral di kongres ini menampung mosi-mosi yang telah disetujui. Mosi ini pada intinya menyatakan bahwa pergerakan buruh harus berhaluan sosialis karena kerugian dari kapitalisme bisa ditunjukkan dalam masyarakat sosialis (*Soeara Ra'jat* no. 8, thn. 2, 10 Juli 1919: 3). Mosi tersebut seakan menetapkan bahwa badan sentral yang akan didirikan memang meneguhkan diri pada sosialisme.

Kongres PPPB berakhir dengan menghasilkan komite yang akan menindaklanjuti pembentukan federasi. Komite terdiri dari perwakilan tujuh serikat buruh bumiputra untuk menggodok rancangan federasi. Mereka adalah Soerjopranoto, Alimin, Soebakat, Prawirosoeganda, Swandono, dan Semaoen

(*Soeara Bekelai* no. 1, thn. 1, 29 Februari 1920: 12; *Sinar Hindia* No. 146, thn. 21, 31 Juli 1920: 1). Rancangan itu diserahkan kepada Semaoen yang menyusun keterangan pokok haluan, program pokok, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga organisasi.

Komite ini kemudian melaporkan hasil kerjanya pada kongres CSI di Surabaya pada Oktober 1919. Pembicaraan mengenai RSV di kongres CSI rupanya belum cukup. Atas dasar ini, disepakati untuk menyelenggarakan kongres sendiri sekaligus deklarasi berdirinya federasi. Kongres ini diadakan di Yogyakarta pada tanggal 25 dan 26 Desember tahun 1919 (*Sinar Hindia* No. 146, thn. 21, 31 Juli 1920: 1; Bambang Sulistyono, 1995: 90). Kongres dihadiri oleh perwakilan dari 44 serikat buruh.

Kongres menyepakati pembentukan federasi ini dengan nama Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB). Dalam anggaran dasarnya, PPKB bermaksud untuk mengajak persatuan antara sederajat kaum buruh supaya dapat memperoleh suatu kekuasaan. Kekuasaan ini akan digunakan untuk memperhatikan keperluan kaum buruh baik lahir maupun batin, terutama keperluan anggota serikat buruh yang terhimpun dalam PPKB (*Soeara Bekelai*, 29 Februari 1920: 10).

Adapun struktur pimpinan sementara PPKB, terdiri dari Semaoen (*vorzitter* atau ketua), Thomas Najooan (sekretaris), dan P. Bergsma (*penningmeester* atau bendahara). Soetadi, Tjokroamidjojo, Soegeng serta satu perwakilan yang ditunjuk PGHB menduduki jajaran komisaris. Ditentukan pula agar tiap anggota serikat membayar uang kontribusi pada PPKB sebesar f 0.10 per tahun. Bersama Piet Bergsma dan Najooan, Semaoen lantas membentuk komite sentral sementara PPKB di Semarang, menempati kantor VSTP (Takashi Shiraishi, 1997: 300-301). PPKB juga telah berniat mendirikan *afdeelingcentraal* atau cabang federasi. *Afdeelingcentraal* dibentuk di suatu tempat dari dua atau lebih cabang serikat buruh yang terdaftar sebagai anggota PPKB. Apabila di suatu tempat hanya ada satu cabang serikat buruh anggota PPKB, cabang tersebut dianggap sebagai *afdeelingcentraal* PPKB luar biasa.

Pada bulan Maret dan April 1920, telah diusahakan pembentukan *afdeelingcentrale* atau cabang PPKB di sembilan belas tempat, yaitu Surabaya,

Pasuruan, Probolinggo, Klakah, Jember, Kalisat, Malang, Bangil, Mojokerto, Cirebon, Cikampek, Rangkasbitung, Serang, Buitenzorg, Bandung, Purwakarta, Banjar, Maos, dan Kebumen. Pada bulan Juni 1920, tiga *afdeelingcentraal* diusahakan pembentukannya di Pekalongan, Cepu, dan Blora (*Soeara Bekelai*, 30 April 1920: 40-43; 31 Juli 1920: 49-50). Sejauh itu, berarti sudah terdapat 22 *afdeelingcentraal* PPKB, baik yang sudah berdiri maupun sedang diusahakan pembentukannya.

Sampai bulan Agustus 1920, PPKB tercatat telah mengumpulkan 22 serikat buruh mewakili 72.000 buruh. Kebanyakan anggota PPKB berasal dari PFB, PPPB, dan VSTP. Untuk keperluan menyebarkan informasi tentang perburuhan dan jalannya federasi ini, PPKB menerbitkan organ resmi bernama *Soeara Bekelai* yang rencana terbit tiap bulan sekali. Harga berlangganan *Soeara Bekelai* bagi anggota serikat buruh yang tergabung dalam PPKB sebesar f 3 setahun, sementara nonanggota dikenakan harga f 4. Untuk berlangganan selama 6 bulan, ditetapkan harga f 1,50 bagi anggota dan f 2 bagi nonanggota. Batas minimal berlangganan *Soeara Bekelai* adalah 3 bulan, dengan tarif f 0,75 untuk anggota dan f 1 untuk nonanggota.

Kelahiran PPKB menjadi relevan sebagai upaya menghimpun serikat buruh untuk memperhatikan hak pekerja secara luas. Hal ini karena federasi untuk para pekerja Eropa telah lebih dulu berdiri, yaitu *Verbond van Vakverenigen van Landienaren (Vakcentrale V.V.L.)* dan *Federatie van Europeesche Vakbonden* (federasi buruh Eropa partikelir) (*Soeara Bekelai*, 31 Juli 1920: 52).

D. PPKB dalam Pemogokan Buruh Percetakan di Semarang

PPKB segera mengambil peran sebagai federasi dengan mengoordinir pemogokan buruh percetakan di Semarang. Pemogokan ini terjadi di perusahaan percetakan *van Dorp*. Permulaan bulan Februari 1920, sebuah pertemuan diadakan guna membahas pemogokan agar tuntutan para buruh terpenuhi. Tuntutan tersebut meliputi kenaikan gaji sampai 50 persen, hak untuk memperoleh jatah cuti sebanyak 14 hari dalam satu tahun, pemenuhan hak pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan saat hari raya Jawa, dan gaji dua kali lipat apabila disuruh bekerja

di hari minggu atau hari besar. Buruh-buruh percetakan ini sebagian berada di bawah pengaruh SI Semarang yang tergabung dalam *vakgroep afdeeling* pekerja percetakan seluruh Semarang. *Vakgroep* ini menarik pengurus PPKB untuk terlibat dalam aksi buruh percetakan memperjuangkan nasibnya (Semaoen, *Soeara Bekelai* (no. 1, thn. 1, 1920: 3).

Keterlibatan PPKB tidak langsung mendorong diadakannya pemogokan. Keterlibatan tersebut ditujukan untuk mengerem kemungkinan tindakan-tindakan gegabah oleh para buruh sendiri, sembari melakukan negosiasi dan menyusun strategi. PPKB juga ikut mengubah *vakgroep* SI Semarang divisi percetakan menjadi serikat buruh percetakan yang terhimpun di bawah nama *Typogravenbond* (Soe Hok Gie, 2016: 79).

Antara tanggal 16 dan 23 Februari, PPKB makin disibukkan oleh rangkaian pertemuan, menggodok semua pertimbangan, berkirim surat dan utusan kepada para pembesar percetakan, termasuk menyampaikan tuntutan para buruh yang sudah diturunkan. Hasilnya nihil, keberadaan federasi ini pun tidak diakui oleh para majikan. Sehingga PPKB menangkap situasi ini sebagai lampu hijau mengadakan pemogokan umum buruh percetakan di Semarang. Diserukan untuk mengumpulkan dana perlawanan dari derma. Derma dikirim kepada P. Bergsma, bendahara PPKB, atau ke alamat kantor VSTP Semarang (Semaoen, *Indonesia*, No. 1 April 1966: 6) Dana perlawanan menjadi penting karena berperan menyediakan kebutuhan selama buruh mogok kerja.

Tak hanya dikumpulkan dari pemberi derma, orang-orang kaya juga ikut menyumbang, antara lain Haji Busyro (pedagang kayu sekaligus komisaris SI Semarang), Soemitro (pengusaha kretek di Kudus), dan seorang direktur bank Tionghoa di Semarang. Mereka menyumbang derma sampai ribuan gulden, entah memang ingin memberi dukungan atau punya motif balas dendam karena pernah dihina oleh koran *De Locomotief* (Soe Hok Gie, 2016: 79-80).

Hingga 10 April 1920, sebagaimana dilaporkan oleh *Soeara Ra'jat*, pemogokan masih berlangsung. Terhitung sudah tiga minggu lamanya kaum buruh percetakan mogok kerja, terutama di kantor *van Dorp* dan *De Locomotief*. Pemogokan ini diikuti oleh 819 orang, meliputi buruh berbagai perusahaan

percetakan. Angka ini didapatkan dari laporan keuangan *penningmeester stakingscomite* (bendahara pemogokan) di *Soeara Bekelai*, 31 Juli 1920.

Dari peristiwa pemogokan buruh percetakan di Semarang, pengaruh PPKB dalam gerakan buruh sejauh itu terlihat. Sejak saat itu, aktivitas PPKB sebagai federasi sudah tak terdengar lagi. Kendala operasional federasi menyebabkan aktivitas PPKB sempat terhenti.

Kurangnya kontribusi menggarap *Soeara Bekelai* dan minim iuran yang masuk ke federasi menjadi bagian dari masalah operasional ini. Bahkan, PPKB juga terlambat mengadakan kongres lagi yang seharusnya direncanakan pada bulan April 1920, baru terlaksana bulan Agustus 1920. Di samping itu, konflik internal mendorong federasi ini ke arah perpecahan.

E. Dampak Keretakan PPKB bagi Gerakan Buruh

Kegagalan pemogokan buruh pabrik gula pada Agustus 1920 dan dikoordinir oleh *Personeel Fabriek Bonds* (PFB), salah satu serikat anggota PPKB, membelah federasi ini secara jelas menjadi dua kubu. Semarang yang direpresentasikan Semaoen-Bergsma dan Yogyakarta diwakili Soerjopranoto-Salim. Terjadi polemik antar kubu di surat kabar yang saling melempar kesalahan mengenai penyebab gagalnya pemogokan ini.

Pihak Semarang dituduh bertanggung jawab karena secara tiba-tiba Semaoen memerintahkan pembatalan pemogokan melalui telegram saat PFB sudah mengirim ultimatum kepada para pengusaha pabrik gula. Terlebih, isi telegram tersebut bocor hingga diketahui para majikan. Sebaliknya, kubu Semarang berpendapat, perintah pembatalan sudah tepat karena memomentumnya sudah habis. Waktu giling tebu di beberapa pabrik gula telah selesai.

Di luar polemik terkait siapa yang salah atas kegagalan pemogokan, tergambar pula perbedaan substansial mengenai gerakan buruh di kedua kubu. Semaoen dan Bergsma cenderung lebih berpendapat bahwa hanya dengan pergerakan kaum komunis pergerakan buruh di Hindia dapat mengumpulkan kekuatannya. Artinya, kaum buruh di Hindia akan bergerak bersama-sama dengan kaum buruh di negara lain demi kemenangannya.

Agus Salim sebagai tokoh kubu Yogyakarta lebih berpendapat, bahwa kekuatan kaum melarat seluruh dunia tergantung pada keteguhan dan kekuatan pergerakan kaum buruh masing-masing negeri. Bukan malah mengekor pergerakan buruh di negeri lain.

Akibat keretakan PPKB seperti terlihat dari polemik ini, serikat buruh mengalami penurunan anggota. PFB menjadi salah satu serikat yang tampak merasakannya. Setelah berhasil mencapai puncaknya hingga sekitar 30.000 anggota tahun 1919, keanggotaan PFB perlahan menyusut sampai angka 4000 anggota pada 1921 (Semaoen, *Indonesia*, No. 1 April 1966: 71). Penyusutan ini dikarenakan banyaknya anggota buruh yang keluar atau memilih bergabung dengan *Politiek Economische Bond* (Takashi Shiraishi, 1997: 307). Selain itu, PFB juga mengalami krisis finansial (Budiawan, 2006: 138-139).

Adanya sikap dari beberapa cabang PFB untuk berpindah haluan kian memperlemah serikat ini. Antara lain cabang di pabrik gula Klampok dan Purbalingga. Keduanya memutuskan memisahkan diri dari PFB. Mereka kemudian mendirikan Sarekat Buruh Pabrik (SBP) yang berorientasi ke Semarang. Kecenderungan ini membuat SBP juga memandang bahwa pimpinan pusat PFB adalah biang dari perpecahan PPKB (Takashi Shiraishi, 1997: 141).

Ketika keretakan PPKB ikut mengoyak serikat buruh seperti PFB, VSTP adalah pengecualian. Mereka justru mampu meningkatkan jumlah anggotanya. Pada 1920, mereka memiliki sekitar 11.000 anggota. Tahun 1921, ketika PPKB telah retak, anggota VSTP meningkat menjadi sekitar 15.000 (Ruth T. McVey, 2009: 167; Semaoen, *Indonesia*, No. 1 April 1966: 72).

Sejak polemik antar pimpinan PPKB, tidak terlalu jelas bagaimana federasi ini beroperasi. Nama PPKB baru terdengar lagi ketika ada usulan membereskan pertikaian kubu Yogyakarta dan Semarang. Usulan ini dikeluarkan serikat pekerja netral pegawai dinas pekerjaan umum pribumi VIPBOW, dengan memfasilitasi pertemuan anggota-anggota PPKB, 18-19 Juni 1921 di Yogyakarta (*Sinar Hindia* no. 115, thn. 22, 25 Juni 1921: 1). Namun pertemuan yang diadakan ini tidak menghasilkan titik temu. Kedua kubu kukuh dengan pendapat sendiri seputar kegagalan pemogokan PFB dan prinsip tentang gerakan buruh. Pihak Yogyakarta

masih tidak menerima kehadiran kubu Semarang dalam PPKB. Pihak Semarang kemudian mengundurkan diri dari PPKB.

Buntut dari pertemuan di atas menyebabkan mereka yang tergabung dan sepakat dengan kubu Semarang mendirikan federasi baru. Federasi ini bernama *Revolutionair Vakcentrale* (RVC). Sebagaimana ditulis dalam manifesto RVC, kata “revolusionair” dipakai bukan untuk melancarkan revolusi atau pemberontakan. Namun, hanya digunakan untuk membedakan dengan federasi lama. Manifesto RVC diumumkan secara resmi pada *Sinar Hindia*, tanggal 25 Juni 1921 (Ruth T. McVey, 2009: 168).

RVC diperkuat 14 serikat buruh. VSTP, serikat terbesar dan terorganisir, merupakan tulang punggung federasi baru ini (Ruth T. McVey, 2009: 169). Jajaran *hoofdbestuur* RVC terdiri dari Semaoen (*Vakgroep SI*) sebagai ketua, Boedisoejtiro (Wono-Tamtomo) selaku sekretaris, dan Bergsma yang kembali menjadi bendahara. Sementara kursi komisarisi diisi oleh Wignjo (VIPBOW), Soekindar (*Havenarbeidersbond*), Soegeng (*Typogravenbond*), dan Najoran (*Chauffersbond*) yang masih mendekam di penjara. Pada manifesto ini, Tan Malaka sudah masuk ke dalam RVC dengan status menjadi redaktur untuk organ penerbitan yang akan dikeluarkan. Ia mewakili Serikat Pegawai Pelikan Hindia (SPPH) yang mengangkatnya sebagai wakil ketua sejak 24 April 1921 (Harry A. Poeze, 1988: 192).

Dalam manifestonya, RVC menyatakan bahwa persatuan kaum buruh ialah nomor satu bagi federasi baru ini, bukan memenangkan kepentingan serikat tertentu saja. Diserukan pula kepada kaum buruh Hindia untuk tidak bingung lagi memilih federasi karena RVC bersedia membantu keperluan kaum buruh di mana pun berada.

Mengenai nasib PPKB, hal ini baru dibahas dalam kongres PPPB pada 3 Juli 1921. Forum memutuskan, PPKB dilanjutkan dengan dialihkan kepemimpinannya kepada pengurus besar PPPB berdasarkan hasil kongres yang disetujui beberapa wakil serikat buruh dan organisasi lain, di antaranya PGB, *Kweekschoolbond*, PGHB, PFB, *Justitiebond*, dan Muhamadiyah.

Meskipun pada kongres ini Tjokroaminoto ditunjuk sebagai ketua PPPB, tetapi Abdoel Moeis sebagai wakil ketua diminta untuk memegang kepemimpinan harian PPPB (*Neratja*, N o. 127, thn. V, 9 Juli 1921: 1). Ini artinya, Abdoel Moeis juga merangkap sebagai pimpinan PPKB bersama Tjitrosoebono (sekretaris), Tedjomartojo (bendahara), dan Agus Salim (komisaris) (Takashi Shiraishi, 1997: 315). Berubahnya kepemimpinan PPKB dan berdirinya RVC menandai secara resmi berpisahnya hubungan kubu Yogyakarta dan kubu komunis dalam gerakan buruh. PPKB yang digadang-gadang menyatukan kekuatan kaum buruh lewat penggabungan serikat, justru lebih cepat mengalami perpecahan daripada persatuan itu sendiri.

KESIMPULAN

Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB) bisa dikatakan sebagai salah satu tanda perjalanan sejarah kaum buruh di Jawa mengupayakan yang terbaik bagi nasibnya. Kemunculannya pada 1919 bagian dari perwujudan ide-ide sekelompok elite pergerakan yang punya hubungan atau pengalaman mengenai perburuhan. Perkembangan pemikiran mereka terjadi sebagai konsekuensi atas keresahan yang dirasakan terhadap kesulitan kaum buruh.

Setelah didirikan pada akhir tahun 1919, PPKB segera bergerak untuk mengawal gerakan buruh. Ini sempat diperlihatkan dengan mengoordinir pemogokan buruh percetakan di Semarang pada awal tahun 1920 dan menerbitkan organ resmi bernama *Soeara Bekelai*. Namun, aktivitas PPKB terbentur kendala operasional dan gerakan federasi sudah hampir tidak terdengar lagi. Penyebab yang kentara dari terganggunya aktivitas PPKB adalah perbedaan pemahaman di antara pimpinannya mengenai cara untuk mewujudkan tujuan mereka. Akibatnya, PPKB terbagi ke dalam dua kubu utama, yakni kubu Semarang dan kubu Yogyakarta.

Perselisihan dua kubu berdampak pada perpecahan dalam PPKB. Mereka yang pro dengan kubu Semarang mendirikan federasi buruh baru dengan nama *Revolutionair Vakcentrale*. Kubu Yogyakarta akhirnya memilih mengaktifkan kembali PPKB dengan diperkuat serikat-serikat buruh yang masih terikat dengan Sarekat Islam. Ketegangan antar kubu di PPKB menyurutkan harapan mengenai

terwujudnya tujuan mereka selama ini. Fungsi Vakcentrale telah berakhir menjadi perebutan massa buruh untuk menanggung dukungan bagi masing-masing kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Perpustakaan Nasional RI No. Roll 2014/PN/M. *Soeara Bekelai*, no. 1, thn. 1, 29 Februari 1920.

Perpustakaan Nasional RI No. Roll 2014/PN/M. *Soeara Bekelai*, no. 2, thn. 1, 30 Maret 1920.

Surat Kabar

Neratja, no. 127, tahun ke-5, 9 Juli 1921.

Soeara Ra'jat, no. 8, tahun ke-2, 10 Juli 1919.

Soeara Bekelai, no. 3, tahun ke-1, 30 April 1920.

_____, no. 4, tahun ke-1, 31 Juli 1920.

Sinar Hindia, no. 146, tahun ke-2, 31 Juli 1920.

_____, no. 115, tahun 22, 25 Juni 1921.

Buku

Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Budiawan, *Anak Bangsawan Bertukar Jalan*, Yogyakarta: LKiS, 2006.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indoensia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.

Ingleson, John, *Perkotaan, Masalah Sosial, dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.

Masyhur Amin. *HOS. Tjokroaminoto: Rekonstruksi Pemikiran dan Perjuangannya*, Yogyakarta: Cokroaminoto University Press, 1995.

McVey, Ruth T., *Kemunculan Komunisme Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

Niel, Robert Van, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2018.

- Poeze, Harry A., *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik I*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988.
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2010.
- Semaoen, "The Indonesian Movement in Netherlands Indies", *Indonesia*, No. 1, April 1966, hlm. 50-75.
- Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah*, Yogyakarta: MataBangsa, 2016.
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah UNY, 2013.